

Kronologi dan Deskripsi

Proses Digitalisasi Aksara Nusantara oleh PANDI

Ilham Nurwansah

ilham@pandi.id

(10 Agustus 2021)



1. Proses Pengajuan IDN ke ICANN

1.1 Latar Belakang

IDN adalah kependekan dari *Internationalized Domain Name* yang secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai sebuah standar pemberian nama domain internasional untuk aksara non-Latin. IDN dapat diterapkan pada Top Level Domain name untuk kode negara (cc TLD) dengan menggunakan aksara selain Latin. Dengan diterapkannya IDN untuk cc TLD, PANDI melihat bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mendaftarkan nama domain internet dengan menggunakan aksara-aksara daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, PANDI melakukan serangkaian upaya untuk mendaftarkan aksara daerah Indonesia kepada ICANN dan IANA agar bisa diterima sebagai nama domain. Aksara yang pertama didaftarkan untuk mendapatkan IDN cc TLD Indonesia adalah aksara Jawa.

1.2 Kronologi

Pada 10 Juni 2020 PANDI secara resmi mengirimkan pengajuan pendaftaran aksara Jawa sebagai IDN untuk ccTLD Indonesia kepada ICANN melalui jalur cepat (*Fast Track*). Beberapa dokumen tambahan yang dilampirkan yaitu:

- 1) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 12 Mei 2020, Nomor 167/DJAI/AO.02.01/05/2020 perihal surat dukungan untuk  dalam pengajuan proses cepat kepada ICANN
- 2) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 12 Mei 2020, Nomor 167/DJAI/AO.02.01/05/2020 perihal konfirmasi terhadap bahasa Jawa sebagai bahasa resmi untuk pengajuan jalur cepat kepada ICANN
- 3) Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tertanggal 20 Mei 2020 perihal dukungan untuk  untuk pengajuan jalur cepat ke ICANN.

- 4) Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tertanggal 20 Mei 2020 perihal konfirmasi terhadap bahasa Jawa sebagai bahasa resmi untuk pengajuan jalur cepat kepada ICANN.
- 5) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor B. 522/DEP-V/BDY.02.00/05/2020 tertanggal 20 Mei 2020 perihal dukungan untuk **ꦗꦼꦁꦸꦗꦸꦤ** untuk pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 6) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 27 Mei 2020 perihal dukungan untuk pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 7) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 27 Mei 2020 perihal pentingnya pengembangan domain **ꦗꦼꦁꦸꦗꦸꦤ**.
- 8) Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 430/7929 tertanggal 22 Mei 2020 perihal dukungan untuk **ꦗꦼꦁꦸꦗꦸꦤ** dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 9) Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 430/7929 tertanggal 22 Mei 2020 perihal pentingnya pengembangan domain **ꦗꦼꦁꦸꦗꦸꦤ**.

Pada 12 Juni 2020 ICANN (Pitinan - IDN ccTLD Fast Track Team) menerima secara resmi dokumen permohonan pengajuan IDN cc TLD dari PANDI.

Pada 16 Juni 2020 ICANN (Pitinan - IDN ccTLD Fast Track Team) memberikan keterangan evaluasi awal terhadap permohonan yang diajukan oleh PANDI. Terdapat empat poin yang diminta oleh ICANN untuk dievaluasi kembali oleh PANDI, yaitu:

- 1) Kode poin Unicode dalam formulir pengajuan tidak sesuai dengan kriteria nilai A-Label yang dipersyaratkan.
- 2) Bahasa Jawa tidak terdaftar sebagai Administrative language dalam Standar ISO 3166-1.
- 3) Bahasa Jawa tidak terdaftar dalam United Nation Group of Expert Geographical Names (UNGEGN).
- 4) *Meaningfulness string* dipertanyakan karena bahasa dan aksara Jawa tidak terdaftar dalam Technical Reference Manual for the standardization of Geographical Names, United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) Manual.
- 5) Jika keempat materi tersebut telah ditinjau ulang, maka PANDI diminta untuk mengisi formulir lain melalui website pendaftaran IDN.

Pada 17 Juni 2020 PANDI (Bpk. Yudho) membalas email dari Pitinan untuk menanyakan apakah evaluasi yang diperlukan harus melibatkan pemerintah atau komunitas melalui surat resmi, atau cukup penjelasan dari PANDI.

Pada 17 Juni 2020 ICANN (Pitinan - IDN ccTLD Fast Track Team) merespon bahwa tidak diperlukan surat tambahan lain. Tetapi, diperlukan pengisian formulir lain melalui website pengajuan IDN. Pernyataan ini ditanggapi PANDI (Bpk. Yudho) untuk dibahas secara internal.

Pada 7 Juli 2020 PANDI mengisi formulir baru pengajuan IDN melalui website resmi ICANN dengan melampirkan dokumen tambahan untuk melengkapi persyaratan dokumen pendaftaran.

- 1) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 1 Juli 2020 perihal dukungan untuk ꦭꦁꦏꦺꦴ dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 2) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 1 Juli 2020 perihal konfirmasi terhadap bahasa Jawa sebagai bahasa resmi untuk pengajuan jalur cepat kepada ICANN.
- 3) Kawedanan Hageng Panitrapura, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tertanggal 2 Juli 2020 perihal dukungan untuk ꦭꦁꦏꦺꦴ dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 4) Komunitas Sega Jabung tertanggal 2 Juli 2020 perihal dukungan untuk ꦭꦁꦏꦺꦴ dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 5) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMK Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 29 Juni 2020 perihal dukungan untuk ꦭꦁꦏꦺꦴ dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 6) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMK Kota Yogyakarta, tertanggal 27 Juni 2020 perihal dukungan untuk ꦭꦁꦏꦺꦴ dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 7) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMA/MA Kabupaten Bantul, tertanggal 26 Juni 2020 perihal dukungan untuk ꦭꦁꦏꦺꦴ dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 8) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMA Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 26 Juni 2020 perihal dukungan untuk ꦭꦁꦏꦺꦴ dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.

Pada 8 Juli 2020, ICANN (Pitinan - IDN ccTLD Fast Track Team) secara resmi menerima permohonan kedua dari PANDI. Namun berdasarkan ketentuan ICANN, pengajuan dari satu negara hanya diperbolehkan satu kali, sehingga PANDI diminta menutup atau membatalkan salah satu permohonan yang telah diajukan.

pada 20 Juli 2020, PANDI (Bpk. Yudho) merespon email dari ICANN dengan menambahkan lampiran kembali beberapa dokumen yang sama dengan dokumen pada tanggal 7 Juli 2020:

Pada 22 Juli 2020 sampai 6 November 2020 dilakukan korespondensi intensif antara PANDI (Bpk. Yudho) dengan ICANN (Pitinan) tentang kelengkapan dokumen dan perihal teknis lain dalam proses pengajuan IDN kepada ICANN.

Pada 10 Desember 2020, ICANN memberikan laporan hasil evaluasi IDN ccTLD aksara Jawa oleh tim teknis dari ICANN. Dalam keterangan ini, dinyatakan bahwa **aksara Jawa ditolak** dengan beberapa alasan teknis. Dengan demikian **permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut**. Lebih lanjut disertakan pula rincian hasil evaluasi tim teknis ICANN yang terdiri dari 11 poin (laporan lengkap dapat dilihat pada website dokumentasi teknis MIMDAN¹ [dokumen register: [DAN-013](#)]).

Pada 31 Januari 2021, PANDI merespon dengan menyatakan akan berupaya memperbaiki kriteria yang dimaksudkan dalam laporan evaluasi teknis ICANN. Kedua, PANDI menanyakan kemungkinan jika aksara Jawa telah naik statusnya ke tabel 5 di Unicode, apakah akan bisa memenuhi persyaratan?

Pada 2 Februari 2021, ICANN menyatakan sedang mereview pertanyaan yang diajukan oleh PANDI.

Pada 4 Mei 2021, ICANN memberikan penjelasan atas pertanyaan dari PANDI tanggal 31 Januari 2021. Dalam uraiannya, ICANN menyatakan dengan penekanan pada dua hal, yaitu:

- 1) DNS Stability Panel notes "While accepting this representation as meeting the third criterion of Section 3.2, we note that **it is difficult to reconcile with considerable evidence that the Javanese script is not commonly used within the country; the Javanese language is written today only in Latin-based characters except for scholarly, historical, or decorative purposes.**"
- 2) DNS Stability Panel also notes that "**The entire block of Javanese characters U+A980 through U+A9DF is excluded from the Integration Panel's Maximal Starting Repertoire.** following the direction of ICANN's Procedure to Develop and Maintain the Label Generation Rules for the Root Zone in Respect of IDNA Labels: "The panel must exclude any code points used only for archaic or historical purposes." **The exclusion of the Javanese script from the MSR follows its designation as a "Limited Use Script" in Section 2.4 Table 7 of Unicode Identifier and Pattern Syntax. The current Unicode identifier status of the code points in the Javanese script block is "restricted."** Unicode Security Mechanisms recommends that "[r]estricted characters should be treated with caution in registration, and disallowed unless there is good reason to allow them in the environment in question."

Pada 5 Mei 2021, ICANN menindaklanjuti kembali percakapan tanggal 31 Januari 2021, jika tidak ada kelanjutannya, maka permohonan akan ditutup pada 1 Juni 2021.

Pada 28 Juni 2021, ICANN menindaklanjuti dengan menutup permohonan dan percakapan karena tidak ada informasi lain dari PANDI.

1 <https://doc.merajutindonesia.id>

1.3 Kesimpulan

Dari penelusuran kronologi dan komunikasi antara PANDI dengan ICANN, setidaknya didapatkan dua kesimpulan umum:

- a) Pengajuan IDN aksara Nusantara belum bisa dilanjutkan selama syarat-syarat mendasar belum terpenuhi. Jika pengajuan baru tetap dilakukan tetapi persyaratan belum terpenuhi, maka kemungkinan besar akan ditolak kembali oleh ICANN.
- b) Diperlukan upaya strategis, terstruktur dan masif untuk membuktikan bahwa aksara Nusantara benar-benar memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai IDN cc TLD ke ICANN.

2. Proses Pengajuan SNI ke BSN

2.1 Latar Belakang

Proses pengajuan Standar Nasional Indonesia (SNI) aksara Nusantara kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang diinisiasi oleh PANDI merupakan salah satu upaya tindak lanjut atas beberapa kondisi yang berhubungan dengan persyaratan pengajuan IDN aksara Jawa (dan aksara daerah lainnya) kepada ICANN. Ada 11 kondisi yang tidak terpenuhi dalam proses pengajuan aksara Jawa untuk IDN cc TLD Indonesia. Selengkapnya dapat dilihat pada dokumen **DNS Stability Panel Report- ICANN (IDN Aksara Jawa)** [[DAN-013](#)] pada register Dokumentasi Teknis MIMDAN.

Sebagai tanda bahwa aksara daerah dianggap "digunakan secara luas" (*commonly used*) di Indonesia oleh ICANN, maka ada beberapa persyaratan normatif yang harus terpenuhi, antara lain:

- 1) Memenuhi status *Recommended Script* pada Standar Unicode UAX#31 - *Unicode Identifier and Pattern Syntax*. Aksara daerah Indonesia **harus terdaftar pada Tabel 5** dalam lampiran [Standar Unicode UAX#31 - Unicode Identifier and Pattern Syntax](#), bagian 2.4, sedangkan **saat ini aksara Bali, Batak, Jawa, dan Sunda masih terdaftar pada Tabel 7** dengan status *Limited Use* atau 'penggunaan terbatas'. Bahkan, **aksara Bugis terdaftar pada Tabel 4** dengan status *Excluded Scripts* atau 'dikecualikan' karena dinilai historis dan penggunaannya pada saat ini sangat terbatas.

Status aksara dapat berubah berdasarkan kondisi terkini yang dilaporkan kepada Unicode melalui register dokumen. Pelaporan atau pengusulan perubahan status aksara dapat diajukan dengan mempertimbangkan kondisi yang dipersyaratkan dalam dokumen [Requirements and Process for Changing Script Status for Identifier Use](#) di Unicode.

- 2) Bahasa daerah Indonesia dan aksara yang digunakan harus terdaftar dalam dokumen [*Technical Reference Manual for the Standardization of Geographical Names*](#) yang diterbitkan oleh United Nations Group of Expert on Geographical Names. Saat ini tidak ada satu pun bahasa dan aksara daerah yang terdaftar dalam dokumen tersebut, tetapi hanya bahasa Indonesia dan aksara Basic Roman (BR atau Latin) dan BR + Indonesian extended (Latin perluasan; huruf É, é [e-acute]). Penyertaan bahasa dan aksara daerah ke dalam dokumen tersebut kemungkinan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga negara terkait dalam pengelolaan bahasa di Indonesia. Dari hasil korespondensi dengan UNGEGN, hal tersebut dapat dibicarakan dengan dua kelompok kerja UNGEGN, yaitu:
- a) [working group 5 on Romanization Systems](#);
 - b) [working group 9 on Geographical Names as Cultural Heritage](#).
- 3) Otoritas publik di Indonesia harus mengkonfirmasi bahwa bahasa daerah yang dimaksud diakui secara resmi oleh negara dan digunakan dalam pelayanan administrasi publik. Walaupun PANDI telah berupaya menyediakan bukti-bukti resmi tertulis dari lembaga otoritas di tingkat daerah dan nasional terkait pengakuan bahasa Jawa sebagai bahasa resmi yang digunakan di Indonesia, tetapi ICANN menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa aksara Jawa tidak digunakan secara luas di Indonesia; bahwa bahasa Jawa saat ini ditulis dengan aksara Latin kecuali untuk tujuan pendidikan, kesejarahan, dan dekoratif². Kondisi tersebut tampaknya akan berlaku juga untuk aksara-aksara daerah lainnya.
- 4) Bahasa daerah harus terdaftar sebagai bahasa administratif di negara Indonesia pada [Standar ISO 3166-1](#) pada kolom 9 dan 10. Saat ini bahasa Jawa (dan bahasa daerah lainnya) belum terdaftar dalam dokumen tersebut. Penyertaan atau perubahan nama bahasa dan status bahasa administratif di Indonesia dapat didiskusikan lebih lanjut dengan ISO 3166 Maintenance Agency :
- ISO 3166 Maintenance Agency
c/o International Organization for Standardization
Chemin de Blandonnet 8
CP 401 1214 Vernier, Geneva
Switzerland
Telephone: +41 22 749 01 11
E-mail: customerservice@iso.org

2 "While accepting this representation as meeting the third criterion of Section 3.2, we note that it is difficult to reconcile with considerable evidence that the Javanese script is not commonly used within the country; the Javanese language is written today only in Latin-based characters except for scholarly, historical, or decorative purposes."

Untuk berkomunikasi kepada ISO 3166 Maintenance Agency dapat melakukan audiensi dan koordinasi dengan Badan Standar Nasional sebagai otoritas standar nasional di Indonesia.

Inisiatif pengajuan SNI aksara Nusantara kepada BSN diharapkan menjadi salah satu cara untuk memperluas penggunaan aksara daerah di lingkup nasional. Dengan adanya SNI terkait aksara daerah, perangkat berbasis teknologi yang beredar di Indonesia harus memenuhi SNI yang telah dibuat. Dengan demikian, rekognisi aksara-aksara daerah Indonesia dapat lebih luas dan penggunaannya semakin bertambah.

Untuk meningkatkan rekognisi aksara daerah di tingkat nasional dan internasional, diperlukan sinergi yang baik antara PANDI, pegiat aksara, lembaga pemerintah, lembaga daerah, akademisi ahli, dan unsur pemangku kepentingan lainnya. Perlu dilakukan berbagai langkah strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang agar aksara daerah semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas di Indonesia.

2.2 Kronologi

17-19 Maret 2020, diselenggarakan Pra Kongres Aksara Jawa di Yogyakarta untuk membahas persiapan kegiatan Kongres Aksara Jawa.

22-26 Maret 2021, diselenggarakan Kongres Aksara Jawa pertama yang membahas tiga topik utama, yaitu *Javanese General System of Transliteration* (JGST), tata tulis aksara Jawa, dan digitalisasi aksara Jawa. Hasil Kongres Aksara Jawa I dapat dilihat selengkapnya pada dokumen berikut [\[DAN-002\]](#).

21 April 2021, diadakan diskusi pembuatan SNI Font dan keyboard aksara Jawa bersama PANDI, SDPPI, Kominfo dan BSN, serta tim KAJ secara daring. Pada rapat ini ditentukan bahwa akan disusun tiga buah dokumen usulan, yaitu usulan RSNI1 fon aksara Jawa, RSNI1 keyboard aksara Jawa, dan RSNI1 transliterasi aksara Jawa (JGST). Materi untuk pengusulan RSNI1 diadaptasi dari hasil Kongres Aksara Jawa I.

10 Mei 2021, diadakan rapat daring untuk membahas teknis dan pengkajian ulang dokumen RSNI dan NWIP yang telah dikerjakan oleh tim pengusul SNI aksara Jawa. Kegiatan ini dihadiri oleh PANDI, tim pengusul SNI aksara Jawa, BSN dan Kemenperin. Dari hasil pengkajian ulang, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti definisi, tujuan dan gambaran umum yang masih belum spesifik. Dengan demikian tim pengusul SNI aksara Jawa perlu melakukan beberapa perbaikan terhadap draf usulan yang diajukan.

17 Mei 2021, dilakukan koordinasi internal secara daring antara PANDI dan tim pengusul SNI aksara Jawa untuk membahas materi perbaikan dokumen RSNI1 yang sedang dikerjakan. Dalam pertemuan ini dibahas bagian-bagian dokumen yang lebih rinci sesuai arahan dari BSN. Tim pengusul SNI aksara Jawa kemudian melakukan proses perbaikan dokumen RSNI1.

07-08 Juni 2021, diselenggarakan *Focused Discussion Group* (FGD) Standardisasi Aksara Sunda di Kota Bogor. Dalam kegiatan ini dilakukan perumusan standar transliterasi, standar fon, dan standar tata letak keyboard aksara Sunda. Hasil dari perumusan ketiga standar dalam kegiatan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan RSNI1 fon aksara Sunda, dan RSNI1 keyboard aksara Sunda.

16 Juli 2021, diadakan rapat daring dengan topik pembahasan usulan RSNI1 Aksara Jawa & Sunda yang dihadiri oleh PANDI, tim pengusul SNI aksara Jawa dan Sunda, dan BSN. Dalam agenda ini BSN memberikan pandangannya terhadap rancangan dokumen yang telah diajukan oleh tim pengusul SNI aksara Jawa dan Sunda. Dari hasil pengkajian dan diskusi, pengusulan RSNI1 untuk kedua aksara disarankan untuk digabungkan dengan pertimbangan bahwa kedua dokumen memiliki struktur isi yang sama.

Dengan demikian terjadi perubahan konsep dari yang tadinya direncanakan untuk mengusulkan tiga SNI untuk satu aksara daerah. Konsep awal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

3 SNI untuk aksara Jawa (SNI fon aksara Jawa, SNI keyboard aksara Jawa, SNI transliterasi aksara Jawa), 3 SNI untuk aksara Sunda (SNI fon aksara Sunda, SNI keyboard aksara Sunda, SNI transliterasi aksara Sunda). Jadi, akan ada 6 SNI yang disusun.

Komposisi usulan seperti itu dinilai tidak efisien oleh BSN. Karena jika ada tambahan aksara baru, maka akan ada 3 buah standar lagi yang dibahas, demikian seterusnya. Artinya akan terlalu banyak memakan waktu dan biaya untuk mengadakan rapat teknis yang sama, padahal struktur dan isi yang dibahasnya juga sama (SNI fon, SNI keyboard, dan SNI transliterasi). BSN menyarankan konsep usulan yang lebih sederhana, yaitu:

Dibuat hanya 3 SNI, yaitu SNI fon aksara Nusantara (mencakup berbagai aksara)³, SNI keyboard multilingual aksara Nusantara (mencakup berbagai aksara)⁴, dan SNI transliterasi

3 Informasi akan mengacu atau merujuk pada ISO/IEC 10646 - *Universal coded character set* dan ISO/IEC 14496-22- *Open font format*.

4 Informasi akan mengacu atau merujuk pada ISO/IEC 10646 - *Universal coded character set* dan ISO/IEC 9995-9 *Keyboard layouts for text and office systems — Part 9: Multi-lingual, multiscript keyboard layouts*.

aksara Nusantara (mencakup berbagai aksara). Dalam konsep ini RSNI1 aksara Jawa dan Sunda yang sudah ada sebelumnya disarankan untuk digabung sehingga sifatnya lebih generik. Rincian kriteria khusus untuk masing-masing aksara dapat tetap digunakan dan diberikan penjelasannya. Adapun jika ada pengusulan aksara lain yang akan ditambahkan, maka dapat diusulkan melalui amandemen SNI yang sudah ada. Karena alasan teknis dan urgensi, maka dari ketiga standar yang diusulkan, baru dua standar yang menjadi prioritas yaitu SNI fon aksara Nusantara dan SNI keyboard multilingual aksara Nusantara. Sedangkan untuk SNI transliterasi masih diperlukan kajian mendalam bersama pihak terkait seperti LIPI, Filolog, Epigrafi, dan akademisi untuk menentukan transliterasi generik aksara Nusantara.

2 Agustus 2021, PANDI melakukan rapat internal secara daring untuk menanggapi dan menindaklanjuti perubahan konsep pengusulan SNI. Dalam rapat ini diputuskan bahwa tidak hanya aksara Jawa dan Sunda saja yang akan dimasukkan dalam usulan RSNI1 fon aksara Nusantara dan RSNI1 keyboard aksara Nusantara, tetapi juga akan menyertakan aksara Bali ke dalam konsep usulan. Dengan demikian akan ada tiga aksara Nusantara yang akan diusulkan untuk mendapatkan SNI, yaitu aksara Jawa, aksara Sunda, dan aksara Bali.

2 Agustus 2021, BSN mengabarkan bahwa Surat Keputusan Komisi Teknis 35 - Komunikasi Digital telah terbit. Dengan demikian BSN tinggal menunggu kesiapan berkas usulan dari PANDI dan tim pengusul SNI aksara Nusantara. Selain itu, **BSN mengabarkan bahwa Kemenperin mengajak untuk bergerak cepat** dalam pengusulan SNI aksara Nusantara ini.

3 Agustus 2021, dilakukan pertemuan daring antara para pengusul SNI aksara Nusantara untuk **membahas penggabungan usulan RSNI1 Fon aksara nusantara** (Jawa, Sunda & Bali). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan tim pengusul SNI aksara Jawa, perwakilan tim pengusul SNI aksara Sunda, dan perwakilan tim pengusul SNI aksara Bali. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan layout dokumen usulan dengan menggabungkan konsep yang sudah ada, melakukan penyederhanaan, penyamaan persepsi dan terminologi yang akan digunakan dalam RSNI1 fon aksara Nusantara. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah penysunan rincian kriteria masing-masing aksara untuk digabungkan dalam badan dokumen dan lampiran-lampiran.

5 Agustus 2021, dilakukan pertemuan daring antara para pengusul SNI aksara Nusantara untuk **membahas penggabungan usulan RSNI1 Keyboard aksara nusantara** (Jawa, Sunda & Bali). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan tim pengusul SNI aksara Jawa, perwakilan tim pengusul SNI aksara Sunda, dan perwakilan tim pengusul SNI aksara Bali. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan layout dokumen usulan dengan menggabungkan konsep yang sudah ada, melakukan penyederhanaan,

penyamaan persepsi dan terminologi yang akan digunakan dalam RSNI1 fon aksara Nusantara. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah penysunan rincian kriteria masing-masing aksara untuk digabungkan dalam badan dokumen dan lampiran-lampiran.

2.3 Kesimpulan

- 1) Terjadi perubahan konsep dokumen pengusulan SNI, berupa integrasi usulan masing-masing aksara menjadi tiga SNI yang lebih generik.
- 2) Perubahan dan penyusunan konsep gabungan menggunakan bahan yang sudah ada pada usulan sebelumnya, namun dengan perbaikan dan pengembagnan materi teknis.
- 3) Penggabungan konsep usulan SNI fon aksara Nusantara dan SNI keyboard aksara Nusantara sedang dalam tahap pengerjaan. Materi-materi tambahan untuk melengkapi konsep dari masing-masing aksara, sedang disusun oleh masing-masing tim pengusul.
- 4) Konsep usulan SNI fon aksara nusantara dan SNI keyboard aksara nusantara diharapkan bisa diberikan lebih awal kepada BSN dan Komtek - 35 untuk dibahas bersama dalam tahap awal.